



Forum Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang

Annissa Valentina¹, Rizqi Apriani Putri², Marliani Marliani³

Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji²

Program Studi Manajemen, Universitas Proklamasi 45²

Email Korespodensi: nisavalen26@umrah.ac.id¹

Abstrak

Artikel ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan dan mengelola potensi sumber daya alam (SDA). Desa ini, yang terletak di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, memiliki potensi SDA yang besar terutama di sektor perikanan, namun menghadapi tantangan dalam pengelolaannya, baik dari segi pengetahuan, infrastruktur, dan aksesibilitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Melalui FGD, perangkat desa dan masyarakat dilatih untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan mengembangkan produk berbasis alam, khususnya sektor perikanan, yang dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Hasil FGD menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan sarana, serta rendahnya pengetahuan kewirausahaan, masih menghambat pemanfaatan SDA secara optimal. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pelatihan lebih lanjut dalam kewirausahaan berbasis hasil laut, peningkatan akses terhadap modal, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi produk. FGD ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal untuk menciptakan model pengelolaan SDA yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, program-program pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilanjutkan dengan penekanan pada peningkatan infrastruktur dan akses pasar untuk mengoptimalkan potensi SDA yang ada, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Catatan Artikel

Dikirim: 18 Desember 2024

Dirivisi: 30 Desember 2024

Diterima: 31 Desember 2024

Kata Kunci

Pemberdayaan Masyarakat,
Pemetaan, Potensi

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.85>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah proses untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir melalui berbagai pendekatan yang bersifat inklusif, partisipasi, dan berkelanjutan (Butarbutar et al., 2020; Kusnadi, 2006). Tujuan utama pemberdayaan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, seperti laut, pantai, dan ekosistem pesisir lainnya (Maryani & Nainggolan, 2019; Usman, 1998). Pemberdayaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta, yang bekerja sama dalam memberikan pelatihan, penyuluhan, serta akses kepada teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir (Hendrayani et al., 2019; Kasmel & Andersen, 2011). Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir juga berfokus pada peningkatan kesadaran lingkungan, agar masyarakat dapat mengelola sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak ekosistem yang ada (Pratama, 2016; Setiawan, 2017).

Pada praktiknya, pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup peningkatan kapasitas ekonomi dengan mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, seperti budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan ekowisata berbasis pesisir. Selain itu, pemberdayaan ini juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, agar keberlanjutan lingkungan pesisir tetap terjaga untuk generasi mendatang (Alsop & Heinsohn, 2012; Scheyvens, 1999). Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah membangun jaringan sosial yang kuat antar warga, agar mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun lingkungan yang ada. Dengan adanya pemberdayaan yang efektif, masyarakat pesisir diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pola hidup yang merusak, meningkatkan pendapatan mereka, serta lebih berdaya dalam mengelola lingkungan hidup mereka secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Dolezal & Novelli, 2022; Nagaoka, 2011).

Desa Busung Panjang, yang terletak di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, memiliki karakteristik geografis yang unik, dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor perikanan (Kurnianingsih et al., 2022). Sebagai desa yang baru terbentuk akibat pemekaran pada tahun 2013, Desa Busung Panjang menghadapi tantangan besar dalam mengelola potensi yang ada, terutama dalam memetakan dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberadaan desa ini juga dibarengi dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, yang menyulitkan perkembangan ekonomi serta pemerintahan desa itu sendiri (Gautama et al., 2020; Trisnawati et al., 2018).

Urgensi kegiatan ini sangat jelas, mengingat rendahnya kapasitas kelembagaan perangkat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Salah satu sektor yang belum digali secara maksimal adalah sektor perikanan yang menjadi andalan masyarakat Desa Busung Panjang. Walaupun potensi alam yang ada cukup besar, masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan, seperti keterbatasan dalam mengembangkan produk berbasis sumber daya alam, serta minimnya pengetahuan mengenai manajemen kewirausahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan perangkat desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Busung Panjang, yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat pemahaman mereka tentang pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi alam. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan juga menjadi tantangan tersendiri dalam merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Forum Group Discussion (FGD) ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemetaan potensi sumber daya alam (Mohamad & Shahrudin, 2014).

Forum Group Discussion (FGD) ini sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi alam yang ada. Dalam konteks ini, pemetaan potensi sumber daya alam menjadi langkah awal yang krusial untuk mengetahui apa saja yang bisa dioptimalkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Selain itu, sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat desa harus mendapat perhatian khusus, mengingat tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, memperkuat pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam, dan membuka peluang untuk pengembangan UMKM berbasis perikanan dan produk lokal. Ke depannya, pendekatan yang terintegrasi antara pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat terkait

dengan pemetaan potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya yang berkelanjutan. Melalui FGD ini, diharapkan peserta dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat desa agar mereka lebih siap dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Desa Busung Panjang.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, dengan memberi mereka peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program berbasis potensi lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi besar yang dimiliki oleh Desa Busung Panjang, terutama di sektor perikanan, memberikan peluang yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi desa. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, potensi ini akan sulit untuk dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan Desa Busung Panjang dapat menjadi model bagi desa-desa pesisir lainnya dalam hal pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan demikian, FGD ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat desa, tetapi juga untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir.

Metode Pengabdian

Untuk mengembangkan metode pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam di Desa Busung Panjang, sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dapat dirancang dengan beberapa langkah utama di antaranya:

1. Pengenalan FGD akan melibatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari proses pemberdayaan masyarakat. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir, seperti produk perikanan dan keanekaragaman hayati laut. Anggota masyarakat, termasuk pemimpin lokal, nelayan, dan kelompok kesejahteraan keluarga, akan dilibatkan untuk memahami pentingnya pemetaan sumber daya ini untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pengenalan ini bertujuan untuk membangkitkan minat dan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proyek pemetaan sumber daya berbasis masyarakat (Seal et al., 1998).
2. Metodologi FGD akan mencakup sesi interaktif. Sesi ini dirancang untuk mendorong diskusi, memungkinkan peserta untuk mengungkapkan wawasan mereka tentang sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. *Brainstorming* akan digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Fasilitator akan memandu diskusi agar tetap fokus pada identifikasi peluang dan kendala dalam masyarakat, seperti akses ke pasar atau masalah lingkungan (Parker & Tritter, 2006).
3. Bagian workshop dari FGD akan memperkenalkan peserta pada alat dan teknik untuk pemetaan sumber daya (Nyumba et al., 2018). Para ahli teknis akan memberikan panduan tentang cara melakukan survei yang tepat dan menggunakan alat pemetaan geografis. Peserta akan dilatih untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi utama di mana sumber daya alam melimpah dan mengembangkan strategi untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan. Pelatihan teknis ini akan memastikan bahwa masyarakat memperoleh keterampilan yang berharga dalam pemantauan lingkungan dan pemetaan sumber daya, memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol terhadap perkembangan desa mereka.

4. FGD akan ditutup dengan sesi untuk merumuskan rencana aksi. Pada fase ini, peserta akan berdiskusi tentang cara mengimplementasikan ide-ide yang dihasilkan selama diskusi. Mereka akan fokus pada pembuatan rencana aksi kolektif yang mencakup langkah-langkah praktis untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, seperti mendirikan bisnis lokal yang berbasis pada produk laut atau memperkenalkan praktik perikanan ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan ini berkelanjutan, dengan langkah-langkah yang jelas untuk implementasi dan tindak lanjut agar masyarakat tetap terlibat dan bertanggung jawab. Metode ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan mendorong kolaborasi masyarakat secara luas menuju visi pembangunan bersama (Wilkinson, 1998).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Busung Panjang, terdapat beberapa potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar di wilayah pesisir ini. Salah satunya adalah kekayaan biota laut yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan, dan hasil tangkapan ikan mereka, seperti ikan tri, ketam, dan ikan selukur, sudah diekspor ke luar negeri. Potensi ini menunjukkan bahwa Desa Busung Panjang memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung ekonomi lokal. Akan tetapi, dalam mengelola potensi ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan hasil laut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai manajemen kewirausahaan yang berkelanjutan. Hal ini terungkap dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), di mana banyak peserta yang mengungkapkan ketidakmampuan mereka dalam mengelola hasil laut menjadi produk yang bernilai lebih. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu PKK, mengenai cara mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada hasil laut. Program pelatihan ini perlu melibatkan akademisi atau ahli kewirausahaan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan bisnis yang efisien dan berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di Desa Busung Panjang menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi SDA yang ada.

Sarana transportasi yang terbatas, terutama akses ke ibu kota kabupaten yang hanya dapat dijangkau dengan kapal kayu, menyebabkan biaya logistik yang tinggi dan menghambat distribusi hasil tangkapan laut. Selain itu, masalah penerangan yang belum sepenuhnya memadai dan konektivitas internet yang lemah memperburuk kondisi ini. Untuk itu, penting bagi pemerintah desa untuk menggali potensi energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga angin yang sesuai dengan kondisi geografis desa ini, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Sanitasi yang menjadi permasalahan utama di desa ini, khususnya terkait dengan ketersediaan air bersih. Desa Busung Panjang sangat tergantung pada sumber mata air yang terbatas, dan hal ini menyebabkan krisis air bersih yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menemukan solusi jangka panjang, seperti pembangunan sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi dan memadai. Program sanitasi, seperti toilet umum yang sudah mulai dibangun di beberapa pulau, perlu diperluas dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan FGD di Desa Busung Panjang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan pihak luar seperti akademisi. Penguatan kapasitas kelembagaan perangkat desa melalui bimbingan teknis dan sosialisasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif. Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama antara perangkat desa, RT, dan RW untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada dan mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. Peran Pembinaan Perangkat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan di Desa Busung Panjang, peran pembinaan perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), dan Focus Group Discussion (FGD). Dalam kegiatan tersebut, perangkat desa diberikan pemahaman dan keterampilan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, terutama yang berkaitan dengan sektor kelautan. Melalui pendekatan ini, diharapkan perangkat desa dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan.

Pembinaan perangkat desa di Desa Busung Panjang juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam manajemen pemerintahan desa yang lebih baik. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugas pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik yang efisien. Dengan demikian, perangkat desa dapat lebih proaktif dalam menjalankan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD di Des Busung Panjang
Sumber: Penulis, 2022

Dalam FGD yang dilaksanakan, salah satu tema yang dibahas adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam. Desa Busung Panjang, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih terbatas dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan. Pembinaan perangkat desa dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan potensi alam dengan cara yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu solusi yang diajukan dalam diskusi adalah pentingnya pengembangan produk UMKM berbasis hasil laut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perangkat desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Kondisi geografis Desa Busung Panjang yang terletak di pulau-pulau yang terpisah membuat akses terhadap fasilitas umum dan

teknologi informasi menjadi terbatas. Oleh karena itu, pembinaan perangkat desa tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus mencakup penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Tim pengabdian memberikan rekomendasi agar pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti penyediaan listrik yang lebih baik dan akses internet yang stabil.



Gambar 2. Tim PKM melakukan Diskusi Kelompok
Sumber: Penulis, 2022

Akhirnya, keberhasilan dari pembinaan perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Pembinaan yang dilakukan tidak akan berhasil jika masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat, program-program pemberdayaan yang dijalankan akan lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang.

3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Birokrasi di Desa Busung Panjang

Dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dan birokrasi di Desa Busung Panjang, berbagai tantangan telah diidentifikasi yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, terbukti bahwa pelayanan publik di desa ini masih jauh dari optimal, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ke tidak cukupan listrik di desa yang hanya mengandalkan diesel pada saat acara pemerintahan. Selain itu, masalah jaringan internet yang lemah juga menghambat kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang efisien dan minimnya pengetahuan dan keterampilan administrasi yang dimiliki oleh perangkat desa, yang menyebabkan banyak kesalahan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, FGD yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat di desa ini memiliki peran penting. Dalam kegiatan tersebut, perangkat desa diberi pelatihan mengenai cara-cara yang sesuai dengan regulasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat .

Selain itu juga yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa, termasuk RT dan RW, masih belum optimal. Hal ini berdampak pada

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan publik yang tidak maksimal. Pemetaan konflik ini memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada dan solusi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hubungan antar perangkat desa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menerapkan sistem komunikasi yang lebih baik dan inovatif, serta melakukan koordinasi yang lebih erat antar pihak yang terlibat .

Evaluasi lebih lanjut mengungkap dalam sektor sanitasi juga menjadi masalah besar. Desa Busung Panjang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber air bersih, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menyediakan akses air bersih dan meningkatkan fasilitas sanitasi di desa ini. Keterbatasan ini berkontribusi pada kondisi kesehatan masyarakat yang belum sepenuhnya terjaga, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini dalam FGD mengungkapkan kualitas pelayanan publik di Desa Busung Panjang, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Diperlukan inovasi dalam kebijakan dan peningkatan kapasitas birokrasi desa agar pelayanan yang diberikan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perbaikan dalam infrastruktur, sistem administrasi, dan koordinasi antar perangkat desa, diharapkan pelayanan publik di Desa Busung Panjang dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat .

4. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal

Tantangan dalam pengembangan UMKM berbasis potensi lokal sering kali berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha tersebut. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di daerah berbasis potensi lokal, seperti Desa Busung Panjang, antara lain:

- a. Keterbatasan Akses ke Modal dan Pembiayaan; Banyak UMKM di desa terkendala dalam memperoleh akses ke modal usaha yang cukup. Bank dan lembaga keuangan formal sering kali memiliki persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, seperti jaminan yang tidak dimiliki oleh mereka. Keterbatasan dana ini menghambat UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pasar. Pemerintah bisa memberikan program pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM melalui skema kredit mikro atau dengan melibatkan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan pinjaman tanpa jaminan. Selain itu, pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dan pemahaman sistem pembiayaan bisa membantu UMKM mengelola dana yang mereka miliki secara lebih efektif.
- b. Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan dalam Pengelolaan Bisnis; Banyak pengusaha kecil di daerah pesisir yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan bisnis, pemasaran, dan inovasi produk. Hal ini menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Penyuluhan dan pelatihan berbasis keterampilan praktis dan manajerial sangat dibutuhkan. Program seperti bimbingan teknis dan workshop yang mengajarkan cara mengelola bisnis, membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran bisa menjadi solusi. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan berbasis teknologi juga dapat membantu mereka mengembangkan produk yang lebih inovatif dan lebih mudah dipasarkan.
- c. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Pasar; Infrastruktur yang buruk, seperti transportasi dan sarana komunikasi yang terbatas, sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, ketergantungan pada pasar lokal yang terbatas membuat UMKM sulit berkembang. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih pada pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran distribusi barang dan akses pasar, seperti perbaikan jalan, penyediaan listrik, serta pengembangan jaringan internet untuk mendukung transaksi digital.

Selain itu, kerjasama dengan platform *e-commerce* dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi produk lokal untuk dipasarkan secara lebih luas, bahkan secara internasional.

- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Belum Optimal; UMKM di desa berbasis potensi alam sering kali belum dapat mengelola sumber daya alam secara optimal. Misalnya, hasil tangkapan ikan atau produk laut lainnya belum diolah menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mereka terjebak dalam pola bisnis yang hanya bergantung pada komoditas mentah. Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah merupakan kunci. Pelatihan tentang teknologi tepat guna, pengolahan produk secara lebih modern, serta kemasan yang menarik dapat meningkatkan nilai jual produk. Misalnya, mengolah ikan menjadi ikan olahan atau produk makanan khas lokal yang bisa dipasarkan lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar komoditas mentah.
- e. Keterbatasan Dukungan Pemerintah dan Lembaga terkait; Sering kali, UMKM di desa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah atau lembaga terkait dalam hal pemasaran, pengembangan produk, atau akses ke teknologi terbaru. Banyak kebijakan yang belum terjangkau oleh pelaku usaha kecil ini, yang menyebabkan mereka tertinggal dalam persaingan pasar. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada UMKM melalui kebijakan yang mendukung pengembangan usaha lokal, seperti program pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal, penyuluhan tentang hak cipta dan paten produk, serta dukungan dalam akses teknologi dan pasar. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, atau perusahaan besar juga dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengakses teknologi terbaru dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Dengan menyelesaikan tantangan-tantangan ini dan menerapkan solusi yang tepat, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dapat lebih maksimal, mendorong perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Desa Busung Panjang, terlihat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). FGD ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pemetaan potensi SDA yang ada di wilayah pesisir tersebut. Sebelumnya, masyarakat cenderung pasif dalam mengelola SDA, sering kali mengandalkan pemerintah atau pihak luar untuk mengambil keputusan. Namun, melalui forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berbicara, berbagi pengetahuan, dan memberikan masukan terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa mereka. Terlihat bahwa, setelah FGD, masyarakat menunjukkan minat yang lebih besar dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan SDA, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam FGD adalah pemetaan potensi SDA yang ada di pesisir Desa Busung Panjang. Masyarakat secara langsung terlibat dalam mengidentifikasi berbagai potensi, baik itu terkait dengan hasil laut seperti ikan, terumbu karang, maupun potensi pariwisata berbasis alam yang dapat dikembangkan di desa mereka. Proses ini membuka wawasan baru bagi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan SDA, mengingat sebagian besar pendapatan mereka bergantung pada alam. Partisipasi aktif dalam pemetaan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi yang ada, tetapi juga memberi mereka rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka lebih terdorong untuk menjaga dan melestarikan SDA agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.

Selanjutnya, FGD ini juga membahas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk masalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan ilegal dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Diskusi ini memperlihatkan bahwa masyarakat pesisir sering kali terjebak dalam pola konsumsi yang merusak karena kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang terhadap

lingkungan. Oleh karena itu, salah satu hasil penting dari forum ini adalah adanya kesepakatan bersama untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan mengenai praktek-praktek ramah lingkungan dan pengelolaan berbasis masyarakat menjadi salah satu poin utama yang harus dijalankan pasca forum. Melalui pemberdayaan seperti ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kelestarian alam dan mulai merancang strategi untuk mengurangi kerusakan yang sudah terjadi.

Selain itu, pelibatan berbagai pihak dalam FGD, seperti pemerintah daerah, LSM, dan akademisi, sangat memperkaya diskusi dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang pengelolaan SDA. Kehadiran pihak-pihak ini juga memberi dorongan agar masyarakat pesisir tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan yang ada. Kolaborasi antara masyarakat dan berbagai stakeholders ini penting untuk menciptakan model pengelolaan SDA yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, FGD menjadi sarana penting untuk membangun jejaring yang kuat antara masyarakat pesisir dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan, sumber daya, dan kapasitas untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada. Pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing pihak dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam menjaga dan memanfaatkan SDA dengan bijaksana.

Secara keseluruhan, FGD ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tentang potensi SDA, tetapi juga belajar untuk lebih aktif dalam menjaga kelestariannya. Ke depannya, untuk mempertahankan momentum ini, perlu ada kegiatan lanjutan yang dapat memfasilitasi implementasi hasil-hasil diskusi yang telah dicapai. Program-program pendidikan dan pelatihan lebih lanjut sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan teknis dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir akan semakin kokoh dan berperan penting dalam pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kesimpulan

Forum Group Discussion (FGD) di Desa Busung Panjang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam (SDA) memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA. Desa Busung Panjang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, seperti kekayaan biota laut yang telah diekspor ke luar negeri, serta potensi pariwisata berbasis alam. Namun, dalam pengelolaannya, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen kewirausahaan, infrastruktur yang kurang memadai, serta masalah sanitasi dan akses air bersih. Oleh karena itu, kegiatan FGD yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, akademisi, dan LSM menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui FGD juga menyoroti pentingnya pembinaan perangkat desa dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya alam. Pembinaan ini mencakup peningkatan kapasitas manajerial, pemahaman tentang kebijakan dan regulasi yang ada, serta pelatihan kewirausahaan berbasis hasil laut. Selain itu, diskusi dalam FGD menyarankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memecahkan permasalahan yang ada, seperti peningkatan infrastruktur, akses pembiayaan, dan pengelolaan SDA secara efisien dan ramah lingkungan. Hal ini penting untuk menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Dalam konteks pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses ke modal, infrastruktur yang buruk, serta kurangnya pengetahuan dalam mengelola bisnis dan pemasaran. Pembinaan terhadap pelaku UMKM, terutama dalam mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan teknologi

serta sistem pemasaran yang lebih luas, seperti platform e-commerce, diharapkan produk lokal dapat lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui FGD di Desa Busung Panjang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA, serta dukungan kebijakan yang tepat, merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang. Terutama kepada Pemerintah Desa Busung Panjang yang telah memberikan dukungan penuh, serta kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dan berbagi pengetahuan dalam diskusi yang sangat konstruktif ini. Kami juga mengapresiasi kepada tim pengabdian yang telah bekerja keras dalam merancang, menyelenggarakan, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan ini. Keberhasilan forum ini tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama semua pihak yang terlibat, yang sangat berarti dalam upaya meningkatkan pemahaman serta pengelolaan potensi sumber daya alam di daerah pesisir. Semoga hasil dari forum ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Desa Busung Panjang dan masyarakat pesisir secara umum.

Daftar Pustaka

- Alsop, R., & Heinsohn, N. (2012). *Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators*. World Bank Publications.
- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.37304/JEM.V111.1203>
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352–2370. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527>
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Hendrayani, Y., Hashim, N. H., Zen, I. S., & Titisari, P. W. (2019). Stakeholders Collaborations Process Towards Community Empowerment: The Success Story West Java CSR Forum. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 298(1), 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/298/1/012035>
- Kasmel, A., & Andersen, P. T. (2011). Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia). *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2011, Vol. 8, Pages 799–817, 8(3), 799–817. <https://doi.org/10.3390/IJERPH8030799>
- Kurnianingsih, F., Putri, R. A., Mahadiansar, M., & Valentina, A. (2022). Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Desa di Kawasan Pesisir: Pengalaman di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga. *Alfatina: Journal of Community Services*, 2(1), 6–18. <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JoCS/article/view/84>
- Kusnadi. (2006). *Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir* (1st ed.). Humaniora.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*.
- Mohamad, M., & Shahrudin, S. (2014). Online Forum Discussion to Promote Sense of Learning Community among the Group Members. *International Education Studies*, 7(13), 61–74. <https://doi.org/10.5539/ies.v7n13p61>
- Nagaoka, M. (2011). Revitalization of Borobudur: Heritage tourism promotion and local community empowerment in cultural industries. *ICOMOS 17th General Assembly*.

- O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Parker, A., & Tritter, J. (2006). Focus group method and methodology: current practice and recent debate. *International Journal of Research & Method in Education*, 29(1), 23–37. <https://doi.org/10.1080/01406720500537304>
- Pratama, W. D. A. (2016). Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *J+PLUS UNESA*, 5(1), 1–7. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/36/article/view/16059>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Seal, D. W., Bogart, L. M., & Ehrhardt, A. A. (1998). Small group dynamics: The utility of focus group discussions as a research method. *Group Dynamics*, 2(4), 253–266. <https://doi.org/10.1037/1089-2699.2.4.253>
- Setiawan, R. (2017). Manajemen pemberdayaan masyarakat pesisir. *Umrahpress*, 304.
- Trisnawati, A. E., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 29–33. <https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I1.10356>
- Usman, S. (1998). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Wilkinson, S. (1998). Focus group methodology: a review. *International Journal of Social Research Methodology*, 1(3), 181–203. <https://doi.org/10.1080/13645579.1998.10846874>